

AYATROHAÉDI

**Birokrasi Pemerintahan Bali Kuno  
Abad XII – XIII  
Catatan atas Disertasi I Gde Semadi Astra\***

Sejak J. G. de Casparis mempertahankan disertasinya di Universitas Indonesia tahun 1950 yang lalu, hingga sekarang baru tercatat hanya ada 20 disertasi dalam bidang arkeologi yang dipertahankan di Indonesia. Mereka yang "beruntung" berhasil menyelesaikan disertasinya itu adalah R. Soekmono (1974), R. P. Soejono (1977), Noerhadi Magetsari (1982), Edi Sedyawati (1985), Hariani Santiko (1987), Ida Bagus Rata (1991), Haris Sukendar (1991), Ratnaesih Maulana (1992), Santoso Soegondho (1992), Machi Suhadi (1992), Endang S. Hadiati Sukatno (1992), Mundardjito (1993), dan Heriyanti Drajat (1998) yang mampu mempertahankan disertasinya di Universitas Indonesia; dan Timbul Haryono (1995), Sumijati Atmosudiro (1995), I Made Sutaba (1995), I G. Ngurah Anom (1997), I Gde Semadi Astra (1997), Inayati Adrissiyati Romli (1997), dan Riboet Darmasoetopo (1997) yang mempertahankan disertasinya di Universitas Gadjah Mada. Di samping itu, ada dua disertasi yang "diragukan" kearkeologiannya, walaupun digarap oleh sarjana yang secara formal dikenal sebagai arkeolog, yaitu disertasi Rochmah B. Effendi (1995, UI) dan Djoko Sukiman (1995, UGM); demikian pula seorang arsitek, yaitu Parmono Atmadi, menggunakan data arkeologi untuk disertasinya (1979, UGM). Artinya, dalam waktu sekitar 50 tahun terselesaikan 22 disertasi, atau satu disertasi selesai dalam waktu dua setengah tahun!

Dari semua disertasi itu, tercatat hanya tiga disertasi yang dengan tegas menyatakan diri sebagai kajian epigrafi (diluar Casparis), yaitu Machi Suhadi,

---

\* Tulisan ini semula merupakan makalah yang disampaikan pada Pertemuan Ilmiah Arkeologi VII, diselenggarakan Ikatan Ahli Arkeologi Indonesia di Hotel Sahid Jaya, Yogyakarta, 15–8 Pebruari 1999. Terima kasih kepada Sdr. Wanny Rahardjo Wahjudi, M. Hum. yang melengkapi tulisan ini dengan daftar disertasi arkeologi di Indonesia, termasuk yang dipertahankan sesudah PIA VII.

Riboet Darmosoetopo, dan I Gde Semadi Astra. Disertasi Casparis menggarap prasasti-prasasti dari masa Sriwijaya abad IX secara umum; disertasi Machi Suhadi dan Riboet Darmosoetopo menggarap prasasti-prasasti Jawa mengenai masalah yang sama, yaitu sekitar sima walaupun fokusnya berlainan; disertasi I Gde Semadi Astra menggarap masalah birokrasi pemerintahan Bali Kuna. Jumlah empat disertasi epigrafi ini, jika dihitung secara keseluruhan disertasi, tentunya terselesaikan dalam waktu sepuluh tahun. Jika penghitungan dilakukan secara khusus terhadap disertasi epigrafi, simpulannya adalah bahwa sebuah disertasi baru terselesaikan dalam waktu duabelas setengah tahun! Namun tentunya dapat dicari celah untuk berbangga diri: tiga disertasi terakhir karya pribumi Indonesia terselesaikan dalam waktu enam tahun; itu artinya bahwa satu disertasi selesai dalam waktu dua tahun. Apalagi jika dikembalikan ke UGM; prestasinya sangat mengagumkan karena kedua disertasi itu dipertahankan hanya selang lima bulan. Disertasi Semadi Atra dipertahankan bulan Juni 1997, sedangkan disertasi Riboet Darmosoetopo bulan Nopember 1997.

#### CATATAN KECIL MASALAH TEKNIS

Secara umum, disertasi bertajuk *Birokrasi Pemerintah Bali Kuno Abad XII – XIII: Sebuah Kajian Efigrafis* merupakan bukti atas ketekunan, kegigihan, dan semangat pantang menyerah penulisnya. Dalam “Prakata”-nya saja tergambar bahwa sebagai pengajar Fakultas Sastra Universitas Udayana, Semadi Astra mulai “terjerumus” dalam penggarapan disertasi di bawah “pemerintahan” tiga orang rektor dan dua dekan (salah satunya dengan dua kali jabatan), tiga rektor UGM, dan dua direktur Program Pascasarjana UGM. Hanya Ketua Jurusan Ilmu-ilmu Humaniora UGM yang selama itu dijabat oleh tokoh yang sama. Dengan demikian, pada kesempatan yang paling awal, penyampaian ucapan selamat dan penghargaan atas keberhasilan penulisnya mengalahkan kelemahan diri sendiri, dan sekaligus menunjukkan bahwa jika orang lain mampu, mengapa kita harus meragukan kemampuan diri kita untuk mencapai hasil yang sama (sekurang-kurangnya terhadap 17 orang yang selesai lebih dulu), adalah sesuatu yang sangat wajar dan samasekali tidak berlebihan.

Namun, tentu saja, tidak berarti bahwa tidak ada catatan kecil yang dapat dikemukakan terhadap disertasi itu. Harap jangan salah baca, tulisan ini benar-benar merupakan *catatan* kecil, bukan *cacatan* kecil! Catatan-catatan ini menyangkut hal-hal yang sebagian besar lebih bersifat teknis, dan hal-hal yang bersifat ilmiah sebagai tambahan.

Catatan pertama berkenaan dengan pencantuman "Daftar Singkatan" pada bagian yang sangat awal (h. xx). Daftar singkatan itu ternyata sebenarnya lebih mengacu kepada singkatan yang digunakan dalam "Daftar Pustaka" (h. 349–63), dan hanya sebagian kecil yang merujuk kepada "batang tubuh" disertasi. Dengan demikian, alangkah baiknya jika daftar itu ditempatkan di bagian daftar pustaka, kecuali yang memang digunakan dalam bahasan. Dalam pada itu, banyak singkatan yang bertebaran di halaman-halaman bahasan, justru samasekali tidak dicantumkan. Misalnya saja, dalam bahasan itu ditemukan singkatan *Rj* (di tempat lain *RJ*), *Sn.*, *Mp.*, dan *DJ*. Alangkah baiknya jika singkatan-singkatan itu memperoleh haknya sebagai singkatan dan karenanya dimasukkan ke dalam "Daftar Singkatan."

Catatan berikutnya berkenaan dengan "Daftar Pustaka" yang memberikan gambaran mengenai betapa banyak dan luasnya *embaran* (=informasi) yang dilacak, dicari, dicerna dan kemudian digunakan dalam disertasi itu. Namun, perlu juga catatan kecil. Pertama, dalam karya terjemahan, tidak berhenti dengan "alih bahasa...." Dalam hal sumber itu berasal atau merupakan bagian dari buku atau karya yang lebih besar, *embaran* mengenai tempat tulisan itu (halamannya), seyogianya dicantumkan langsung di belakang judul buku atau karya yang lebih besar itu. Sebagai contoh, karya Ibrahim Alfian "Tentang Metodologi Sejarah" petunjuk halamannya seyogianya dicantumkan setelah judul *Dari Babad dan Hakikat sampai Sejarah Kritis*, mengingat halaman 1–12 itu adalah halaman buku itu; bukan halaman penerbit Gadjah Mada University Press! Pencantuman halaman karya yang dimuat dalam majalah ada yang sudah sesuai, walaupun masih dapat lebih "dipadatkan": *Archipel* 21: 125–51, tidak perlu *Archipel* 21, hlm. 125–151. Namun, ada juga nama majalah yang dilengkapi dengan nama penerbitnya sehingga diperlakukan sebagai buku (dan itu samasekali tidak perlu!): *Majalah Arkeologi*, Th. I, No. 1, September 1977. Jakarta: Lembaga Arkeologi Fakultas Sastra, Universitas Indonesia, hlm. 5–30. Daftar panjang itu cukup disingkat menjadi *Majalah Arkeologi* 1.1 (September): 5–10. Dalam pada itu, mengingat bahwa majalah itu muncul lebih dari satu kali, alangkah baiknya jika dimasukkan ke dalam "Daftar Singkatan": *MA* dengan keterangan "*Majalah Arkeologi*, dikeluarkan oleh Lembaga Arkeologi (kemudian Jurusan Arkeologi), Fakultas Sastra Universitas Indonesia."

Dalam pada itu, terdapat rujukan yang membingungkan. Sebagai contoh, "Haryono, Timbul. 1995. "Arkeometalurgi: Prospeknya dalam Penelitian Arkeologi di Indonesia," dalam *PIA* ke III, Ciloto, 23–28 Mei 1983. Jakarta: Proyek Penelitian Purbakala, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, hlm. 1158–1175." Sebenarnya, mana yang dirujuk dalam karya

itu: PIA (1983), atau buku yang tidak jelas namanya? Jika buku yang dirujuk, maka rujukan itu tentulah berjudul *Pertemuan Ilmiah Arkeologi ke-III, Ciloto, 23-25 Mei 1983*, langsung diikuti nomor halaman. Kalau yang dirujuk makalah yang diajukan, tentu tahun rujukan itupun 1983, bukan 1985.

Catatan kecil lainnya, berkenaan dengan kamus yang digunakan sebagai rujukan. Jika untuk kata dan istilah (bahasa) Indonesia digunakan kamus mutakhir (*Kamus Besar Bahasa Indonesia* 1994), mengapa untuk mencari makna kata bahasa Sunda, yang digunakan kamus S. Coolsma (1884) *Soendaneesch-Hollandsch Woordenboek* dan R. Satjadibrata (2604), *Kamoes Soenda-Melajoe* (h. 172), padahal sudah terbit R. Satjadibrata (1954), *Kamus Basa Sunda*, Lembaga Basa jeung Sastra sunda (1985), *Kamus Unum Basa Sunda*, Maman Sumantri dkk (1989), *Kamus Sunda--Indonesia*, atau bahkan yang paling komprehensif, F. S. Eringa (1984), *Soendaas - Nederlands Woordenboek*.

#### CATATAN KECIL MASALAH ILMIAH

Catatan kecil mengenai sesuatu yang berbau ilmiah, diawali dengan pertanggungjawaban penulis disertai berkenaan dengan "Aksara dan Ejaan" (h. xxii-xxvi). Penulis menyatakan bahwa, "Standarisasi penulisan kata-kata tersebut disesuaikan dengan sistem ejaan yang dipakai oleh R. Goris (1954a), P. J. Zoetmulder (1982a, 1982b), Sir Monier-Williams (1986), dan I Wayan Warna dkk. (1978)" (h. xxiii). Sayang sekali, pernyataan yang belum lagi diperjanggungjawabkan mengapa dan bagaimananya itu, sudah disusul dengan pernyataan pada alinea berikutnya di halaman yang sama, "Dapat ditambahkan bahwa sistem transkripsi yang digunakan di sini adalah sesuai dengan sistem yang digunakan oleh Goris sebagaimana tercermin dalam kitabnya yang berjudul *Prasasti Bali I* (1954a)." Apa beda "sistem ejaan" dan "sistem transkripsi" pada kedua pernyataan itu? Lalu, di mana letak lambang bunyi  $\eta$  (anuswara), karena dalam "potret" prasasti *Buwahan E, Batunya B*, dan *Campaga A* rupanya tidak ditemukan? Namun, betulkah anuswara tidak terdapat dalam prasasti Bali? Apakah tabel aksara itu tidak dapat dilengkapi dengan yang berasal dari prasasti lain, untuk menghindarkan kesan seolah-olah sistem bilangan orang Bali bersifat kuinal (=bersifat lima)?

Karena aksara dan ejaan erat berkaitan dengan bahasa, ada baiknya catatan ini dilanjutkan dengan catatan kebahasaan. Catatan ini dibatasi pada hal-hal yang berkenaan dengan pemaknaan kata dan penerjemahan yang terkesan membingungkan karena ketaksaan pilihan dan susunan kata yang digunakan.

Pemaknaan kata *sekarâjya* yang diartikannya 'kerajaan tunggal' (h. 159) terkesan mendasari uraian yang diarahkan untuk memperlihatkan bahwa Bali

masa silam hanya mengenal satu kerajaan yang menguasai seluruh pulau Bali. Untuk memperkuat pendapat itu, dikemukakan bahwa bentuk *sekarâjya* kemungkinan besar mengandung kesalahan sehingga dapat diabaikan (h. 216, cat. 23). Ia lebih cenderung menduga bahwa bentuk yang lebih tepat adalah *saikarâjya* karena selain dengan aturan yang berlaku dalam bahasa Sansekerta (h. 215). Lebih lanjut dikatakannya bahwa kata gabung *saikarâjya* terbentuk atas unsur *sa* + *eka* + *râjya* dan bermakna 'milik/berhubungan dengan/dari kerajaan tunggal' (hys.). Sayang sekali ia tidak memberikan contoh lain mengenai "Pertemuan" *a* + *e* yang menghasilkan *ai*; data dalam bahasa-bahasa Austronesia yang muncul hingga saat ini, pertemuan itu menghasilkan *e*, bukan *ai*. Dalam pada itu, di bawah jejar 'entri, kata kepala' *eka*, kamus P. J. Zoetmulder *Old Javavese – English Dictionary* mencatatkan suku jejar *sa-eka* 'satu, sebuah' dan *seka* 'satu, bersepakat, bersama' (1982: 463). Dengan demikian, *seka* tidak usah diduga berasal dari *sa* + *ika*, (h. 215), melainkan dari *sa* + *eka*.

*Rucita* (=konsep) negara atau kerajaan tunggal itu *mewisesa* (=mendominasi) uraian mengenai birokrasi (Bab III–VI, h. 134–348) yang merupakan tema utama disertasi itu. Dari segi sistematika penulisan, ada sesuatu yang cukup mengganggu alur pikir. Di bawah 3.1 ("Birokrasi dalam unsur-unsur kerajaan"), misalnya, termuat uraian 3.1.2 ("Unsur-unsur negara menurut pandangan modern"). Terlepas dari benar tidaknya uraian itu, pertanyaan yang dapat dikemukakan adalah *benarkah unsur-unsur negara menurut pandangan modern merupakan bagian dari birokrasi dalam unsur-unsur kerajaan (Bali Kuna)?* Kalau jawabannya *ya*, apa alasannya; kalau *bukan*, mengapa uraian itu berada di bawah "payung" yang sama dengan 3.1.1 (*saptângga*)?

Upaya untuk meyakinkan pembaca mengenai ketunggalan kerajaan Bali itu diawali dengan mengemukakan data prasasti Blanjong (913 M) dari raja Kesari Warmadewa yang mencantumkan kata *walidwipa* 'Pulau Bali' dengan alasan bahwa prasasti itu merupakan lambang kemenangan raja itu atas musuh-musuhnya, walaupun secara hati-hati dikatakannya "maka besar kemungkinan dengan penyebutan *walidwipa* (Pulau Bali) itu Raja Kesari menyatakan bahwa dirinya telah menguasai seluruh wilayah Bali," dan data beberapa prasasti lain dari raja yang lebih kemudian (h. 157). Kemungkinan itu bukan sesuatu yang mustahil, namun alangkah baiknya jika dilengkapi dengan sejumlah bukti arkeologis yang berasal dari berbagai wilayah pulau Bali yang muasir, mengingat data prasasti yang masih "bertelau-telau" itu.

Kecenderungan itu dilanjutkan dengan mencoba memberi makna baru terhadap kata *negara*, terutama dalam kaitannya dengan istilah *saptanagara* yang tercantum dalam beberapa prasasti tanpa dukungan bukti tulis yang

lain. Kata *kota* yang dalam Sansekerta bermakna 'kota' itu, disepakatinya bermakna 'ibukota' sebagaimana dikemukakan oleh Goris. "Dengan memperhatikan keterangan-keterangan yang telah disajikan maka *saptanagara* dapat diartikan dengan 'tujuh (ibu) kota'", katanya. Berdasarkan anggapan bahwa di Bali hanya terdapat satu kerajaan tunggal, *saptanagara* itu ditafsirkannya sebagai "ibu kota bagian wilayah kerajaan tertentu" (h. 160). Namun, sedemikian jauh ia tidak berhasil melacak ketujuh "negara bagian" itu, baik namanya maupun ibu kotanya. Padahal, jika dugaan itu dihubungkan dengan uraiannya mengenai jabatan *senapati* yang katanya ada yang mengacu kepada nama daerah, mungkin upaya pelacakan itu sekurang-kurangnya akan membuahkan hasil, betapa pun hipotetisnya. Bukankah di antara para *senapati* itu ada yang ditafsirkannya sebagai "penguasa daerah", yaitu *senapati waranasi*, *senapati wrsanten*, dan *senapati balembunut*, Namun, karena jumlah daerah yang disebutkan hanya tiga, tetap menjadi pertanyaan mengapa *saptanagara* harus ditafsirkan sebagai 'tujuh ibu kota.' Padahal, jika diberi makna 'tujuh kota,' ketunggalan kerajaan itu justru menjadi sangat jelas dan *saptanagara* hanya menunjuk kepada jumlah kota yang (mungkin) penting di kerajaan itu, tanpa harus mempersoalkan apakah itu ibukota negara bagian atau bukan. Masalahnya adalah, kenyataan bahwa petunjuk ke arah itu belum ditemukan samasekali.

Sangat disayangkan disertasi ini merujuk pendapat Muhammad Yamin mengenai "urat kata" yang membingungkan. Selama ini para ahli bahasa beranggapan bahwa "urat kata" bahasa Austronesia adalah *suku terakhir* yang sama dari sejumlah kata. Sutan Takdir Alisjahbana, misalnya, dengan meminjam contoh yang dikemukakan Reinward Brandstetter mencatat bahwa kata-kata *sakit*, *bangkit*, dan *bukit* mengandung "urat kata" yang sama *kit*. Mengapa Yamin tiba-tiba menganggap bahwa "urat kata" *tu*, *to*, atau *tuh* sebagaimana terdapat antara lain dalam kata-kata *Tuhan*, *ratu*, *tuah*, *watu*, *tubuh*, dan *Toraja*? "Urut kata" itu menurut Yamin ternyata dapat terletak baik sebagai suku awal maupun suku akhir, bahkan kata *tuhan* yang diyakini para ahli bahasa berasal dari kata *tuha* + *an* berasal dari "urat kata" *tuh*! Pengacuan kepada pendapat Yamin itulah yang kemudian menyebabkan terjadi benturan ketika ia mencoba menerangkan kata *sapta* yang sebenarnya merupakan homonim: *sapta* 'tujuh', dan *sapta* 'selesai', dengan menyimpulkan bahwa "memasuki wilayah Nusantara maka terjadilah perpaduan makna harfiah dan kias yang sangat sesuai dan padu" (h. 164).

Penerjemahan ke dalam bahasa Indonesia kadang-kadang terganggu oleh longgarnya kaidah bahasa Indonesia itu. Jika *ajña haji* bermakna 'perintah sang raja', apakah tidak membingungkan terjemahan *sang hyang ajña haji*

menjadi 'perintah raja yang patut dihormati' (h. 239)? Apa yang patut dihormati: perintahnya, atau rajanya? Padahal ungkapan bahasa aslinya jelas sekali menunjukkan bahwa yang dihormati itu *sang hyang ajña* 'perintah yang (patut) dihormati'. Dengan demikian, alangkah baiknya jika ungkapan itu diindonesiakan menjadi 'perintah yang patut dihormati dari raja'.

Catatan kebahasaan ini ditutup dengan kerancuan pemaknaan *tanda rakryan* yang diartikan sebagai 'pembesar kerajaan'. Sebelumnya dikemukakan, berdasarkan data prasasti, bahwa *tanda rakryan* adalah para pejabat yang secara hierarkis berada di bawah para *senapati*, walaupun data prasasti yang lain justru menyebutkan bahwa *senapati* (dan *samgat*) termasuk kelompok *tanda rakryan* (h. 227). Setelah mencoba menerangkan makna kata itu secara etimologis, akhirnya dinyatakan bahwa "yang tergolong *tanda rakryan* adalah para *senapati* dan para *samgat*", dengan catatan bahwa ke dalamnya tidak termasuk *samgat* yang dikategorikan sebagai pemuka agama. Barangkali akan lebih meyakinkan jika ditemukan data prasasti, berapa yang menyebutkan bahwa *tanda rakryan* berada di bawah *senapati*, dan berapa pula yang menyatakan sebaliknya, yaitu bahwa *tanda rakryan* terdiri atas *senapati* dan *samgat*.

Disertasi *Birokrasi Pemerintahan Bali Kuno Abad XII – XIII* disusun dengan tujuan untuk "mewujudkan uraian tentang (a) struktur birokrasi, tata hubungan kerja, dan kewenangan atau tugas pejabat-pejabat dalam birokrasi pemerintahan Bali Kuna abad XII–XIII, baik pada tingkat pusat maupun tingkat daerah, dan (b) aspek-aspek yang melatari kebijaksanaan raja dalam melaksanakan kewenangan atau kekuasaannya, secara deskriptif naratif dan eksplanatif sehingga diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan keilmuan pada umumnya, terutama bagi disiplin arkeologi, dan dapat digunakan sebagai bahan bandingan dalam kaitan dengan penelitian serupa" (h. 7).

Upaya itu, sekurang-kurangnya sebagaimana simpulan dalam bab terakhir (h. 342–8), dapat dikatakan berhasil dilakukan. Walaupun, tentu saja, masih ada bagian-bagian yang mungkin perlu direnungkan kembali baik alasan maupun simpulannya.

### Daftar Disertasi Arkeologi

- Adrisijanti, Inajati, (1997), *Kota Gede, Plered dan Kartasura Sebagai Pusat Pemerintahan Kerajaan Mataram (1578 TU - 1746 TU): Suatu Kajian Arkeologi* (Universitas Gadjah Mada).
- Anom, I Gusti Ngurah, (1997), *Keterpaduan Aspek Teknis dan Aspek Keagamaan dalam Pendirian Candi Periode Jawa Tengah: Studi Kasus Candi Utama Sewu* (Universitas Gadjah Mada).
- Astra, I Gede Semadi (1997), *Birokrasi Pemerintahan Bali Kuna Abad XII – XIII: Sebuah Kajian Epigrafis* (Universitas Gadjah Mada).

- Atmadi, Parmono (1997), *Beberapa Patokan Perancangan Pembangunan Candi* (Universitas Gadjah Mada).
- Atmosudiro, Sumijati (1994) *Gerabah Prasejarah di Liang Bua, Melolo dan Lewoleba: Tinjauan Teknologi dan Fungsinya* (Universitas Gadjah Mada).
- Darmosoetopo, Riboet (1997), *Hubungan Tanah Sima dengan Bangunan Keagamaan di Jawa pada IX – X TU* (Universitas Gadjah Mada).
- de Casparis, J.G. (1950), *Inscripties uit de Çailendra tijd* (Universitas Indonesia).
- Erfendi, Rochmah Budiasih (1994), *Virataparva Sansekerta dan Bentuk-bentuk Transformasinya di Indonesia* (Universitas Indonesia).
- Haryono, Timbul (1994), *Aspek Teknis dan Simbolis Artefak Perunggu Jawa Kuna Abad VIII – X* (Universitas Gadjah Mada).
- Magetsari, Noerhadi (1982), *Pemujaan Agama Tathagata di Jawa pada Abad Sembilan* (Universitas Indonesia).
- Maulana, Ratnaesih (1993), *Siva Dalam Berbagai Wujud: Suatu Analisis Ikonografi di Jawa Masa Hindu-Buddha* (Universitas Indonesia).
- Munandar, Agus Aris (1999), *Pelebahan: Upaya Pemberian Makna pada Puri Bali Abad 14 – 19 M* (Universitas Indonesia).
- Mundardjito (1993), *Pertimbangan Ekologis dalam Penempatan Situs Masa Hindu-Buda di Daerah Yogyakarta: Kajian Arkeologi Ruang Skala Makro* (Universitas Indonesia).
- Sartiko, Hariani (1987), *Kedudukan Bhatari Durga di Jawa pada abad X – XV Masehi* (Univesitas Indonesia).
- Sedyawati, Edi (1985), *Pengarcaan Ganesa masa Kadiri dan Singhasari: Sebuah Tinjauan Sejarah Kesenian* (Universitas Indonesia).
- Soegondho, Santoso (1993), *Wadah Keramik Tanah Liat dari Gilimanuk dan Plawangan: Sebuah Kajian Teknologi dan Fungsi* (Universitas Indonesia).
- Soejono, R.P. (1997), *Sistim-sistim Penguburan pada Akhir Masa Prasejarah di Bali* (Universitas Indonesia).
- Soekatno, Endang Sri Hardiati (1993), *Arca Tidak Beratribut Dewa di Bali: Sebuah Kajian Ikonografis dan Fungsional* (Universitas Indonesia).
- Soekmono, R (1974), *Candi : Fungsi dan Pengertiannya* (Universitas Indonesia).
- Suhadi, Machi (1993), *Tanah Sima dalam Masyarakat Majapahit* (Universitas Indonesia).
- Sukendar, Haris (1993), *Arca Menhir di Indonesia: Fungsinya dalam Peribadatan* (Universitas Indonesia).
- Sutaba, I Made (1995), *Tahta Batu Prasejarah di Bali: Telaah tentang Bentuk dan Fungsinya* (Universitas Gadjah Mada).
- Untoro, Heriyanti Ongkodharma (1998), *Perdagangan di Kesultanan Banten (1552 – 1684): Kajian Arkeologi-Ekonomi* (Universitas Indonesia)